



KOTA MALANG
BERMARTABAT



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG



PEMERINTAH KOTA MALANG

Jl. Tugu Nomor 1 Malang - Jawa Timur 65119
Telp. (0341) 362704 Fax. (0341) 352070
www.malangkota.go.id



Hakekat Bermartabat:
Perwujudan dan Implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin.
Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan.

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2018.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Malang, 25 Maret 2019

WALIKOTA MALANG,



Drs. SUTIAJI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kota Malang	2
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	7
D. Susunan Perangkat Daerah.....	8
E. Sumber Daya Aparatur	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018.....	12
B. Indikator Kinerja Utama	24
C. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Kinerja.....	33
B. Inovasi Daerah	47
C. Akuntabilitas Keuangan	49
D. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	55
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	58



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT

Jl. GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Malang untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 14 Maret 2019


Pt. INSPEKTUR KOTA MALANG,
Dra. ANITA SUKMAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601217 198603 2 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kota Malang Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017, yang merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan maksimal yaitu 90%.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 1.925.072.660.968,5 dari pagu anggaran Rp. 2.360.831.551.277,57, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp.435.758.890.309,02 atau 18,46%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.



BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada $112^{\circ}34'38.83''\text{BT}$ - $112^{\circ}40'59.41''\text{BT}$ dan $07^{\circ}54'38.97''\text{LS}$ - $08^{\circ}02'47.04''\text{LS}$, dan secara geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung dengan Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yakni:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai. Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian, dan perkebunan.
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.

- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.
- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi.
- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.

Dengan luas wilayah mencapai 110,78 km², Kota Malang dibagi atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1.	Kedungkandang	12	40,02	36,13
2.	Sukun	11	21,25	19,18
3.	Klojen	11	8,32	7,51
4.	Blimbing	11	18,15	16,38
5.	Lowokwaru	12	23,04	20,80
Total		57	110,78	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2018 sebesar 916.042 jiwa, yang terdiri dari WNA sejumlah 1.086 jiwa dan WNI sejumlah 914.956 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 11.751 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Blimbing sebesar 216.222 jiwa yang terbagi ke dalam 67.682 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan Sukun merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 110.421 jiwa yang terbagi ke dalam 37.122 KK, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan
per 31 Desember 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Kota (%)	Jumlah KK
1.	Kedungkandang	200.663	21,91	64.199
2.	Sukun	110.421	12,05	37.122
3.	Blimbing	216.222	23,60	67.682
4.	Lowokwaru	212.222	23,17	68.022
5.	Klojen	176.514	19,27	56.378
Total		916.042	100	293.403

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Klojen merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementara Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kecamatan
per 31 Desember 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Blimbing	200.663	18,15	11.056
2.	Klojen	110.421	8,32	13.272
3.	Kedungkandang	216.222	40,02	5.403
4.	Sukun	212.222	21,25	9.987
5.	Lowokwaru	176.514	23,04	7.661
Total		916.042	110,78	8.269

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diolah)

Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif, yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 640.656 jiwa atau 69,94% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia tidak produktif sebanyak 275.386 jiwa atau 30,06% dari total penduduk. Adapun uraian jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur
per 31 Desember 2018

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk (%)
1.	0 - 4	44.285	4,83
2.	5 - 9	69.118	7,55
3.	10 - 14	69.361	7,57
4.	15 - 19	71.441	7,80
5.	20 - 24	66.523	7,26
6.	25 - 29	65.853	7,19
7.	30 - 34	71.291	7,78
8.	35 - 39	82.887	9,05
9.	40 - 44	87.872	9,59
10.	45 - 49	66.866	7,30
11.	50 - 54	58.444	6,38
12.	55 - 59	50.806	5,55
13.	60 - 64	39.686	4,33
14.	≥ 65	71.609	7,82
Total		916.042	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, laju ekonomi Kota Malang merupakan yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga terkenal sebagai tempat berdiri dan berkembangnya perusahaan rokok. Di bidang pariwisata, Kota Malang yang terletak di dataran tinggi sehingga berhawa sejuk, menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Malang. Di Malang juga banyak dijumpai hotel dan rumah singgah (*guest house*) yang mengakomodasi kunjungan wisatawan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,69%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,48% dan nasional sebesar 5,17%. Perekonomian Kota Malang didukung oleh kegiatan perdagangan yang merupakan sektor yang sangat dominan dalam membentuk perekonomian Kota Malang, kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 29,60% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 29,54%. Perkembangan laju pertumbuhan sektor Perdagangan di Kota Malang sebesar 5,60%. Kondisi tersebut didukung oleh usaha kecil termasuk jasa perbengkelan yang cukup banyak beroperasi di Kota Malang, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor. Sektor Perdagangan Kota Malang memberikan kontribusi sebesar 5% - 6,6% tiap tahun terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

Di samping itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 25,12% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,40%. Seperti diketahui bahwa Kota Malang memiliki beberapa industri besar, sedang dan kecil yang bergerak dalam bidang pengolahan tembakau, jenis industri ini memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan jenis subsektor pengolahan lainnya.

Selanjutnya inflasi Kota Malang pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,31%, yang relatif lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,75%.

D. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Daerah (ada 6 Badan):
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Dinas Daerah (ada 19 Dinas):
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - p. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - q. Dinas Perdagangan;
 - r. Dinas Perindustrian; dan
 - s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kecamatan (ada 5 Kecamatan):
 - a. Kecamatan Kedungkandang, meliputi 12 Kelurahan;
 - b. Kecamatan Sukun, meliputi 11 Kelurahan;
 - c. Kecamatan Klojen, meliputi 11 Kelurahan;
 - d. Kecamatan Blimbing, meliputi 11 Kelurahan; dan
 - e. Kecamatan Lowokwaru, meliputi 12 Kelurahan.

E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan data (SIMPEG) Tahun 2018 sebanyak 7.130 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.582 orang dan perempuan sebanyak 3.548 orang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin 2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.582
2.	Perempuan	3.548
	Total	7.130

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	TOTAL	%
1.	SD/Sederajat	347	4,87
2.	SLTP/Sederajat	520	7,29
3.	SLTA/Sederajat	1.515	21,25
4.	Diploma I	14	0,20
5.	Diploma II	181	2,54
6.	Diploma III	465	6,52
7.	Strata I	3.460	48,53
8.	Strata II	621	8,71
9.	Strata III	7	0,10
JUMLAH		7.130	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Malang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 48,53%, disusul pendidikan SLTA sebesar 21,25%.



BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 ditetapkan 12 (dua belas) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, dengan indikator:

1. Angka Melek Huruf dengan target 99,85%
2. Angka Kelulusan SD dengan target 99,25% dan Angka Kelulusan SMP dengan target 99,68%

Sasaran:

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan indikator Angka Harapan Usia Hidup dengan target 71,10

Sasaran:

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah dengan indikator:

1. Pertumbuhan PDRB dengan target 12,76%
2. Persentase koperasi aktif dengan target 62,34%

Sasaran:

- a. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Tujuan 4 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dengan indikator:

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan target 7,00%
2. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah dengan target 5,00%

Sasaran:

- a. Meningkatnya kesempatan kerja;
- b. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah.

Tujuan 5 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan dengan indikator ketersediaan pangan (*food availability*) dengan target:

a. Beras	11.040,00
b. Jagung	509,41
c. Kedelai	7.486,27
d. Daging	27.002,19
e. Telur	2.490,40
f. Susu	259,12
g. Ikan	84,34
h. Gula	256,91

Sasaran:

Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*).

Tujuan 6 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan dengan target 4,30%.

Sasaran:

- a. Menurunnya persentase penduduk miskin;
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial;
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana.

Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dengan target 76,49.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.

Tujuan 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat dengan indikator persentase penurunan angka kriminalitas dengan target 10%.

Sasaran:

1. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota dengan indikator:

1. Predikat Adipura dengan target Piala Adipura
2. Predikat Wahana Tata Nugraha dengan target Piala Wahana Tata Nugraha

Sasaran:

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.

Tujuan 10 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya dengan indikator persentase luasan RTH dengan target 15,97%

Sasaran:

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

Tujuan 11 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sasaran:

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan 12 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 78,66

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kota Malang

Visi : TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT				
Misi	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5
<p>I. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</p>	<p>1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan</p>	<p>Angka Melek Huruf</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan</p>	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI</p>
		<p>Angka kelulusan</p>		<p>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI</p>
				<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs</p>
				<p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs</p>
				<p>Angka Melek Huruf</p>
				<p>Angka Kelulusan</p>
				<p>Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs</p>
	<p>2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</p>	<p>Angka Usia Harapan Hidup (AHH)</p>	<p>1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</p>	<p>Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)</p>
				<p>Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)</p>
				<p>Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)</p>

1	2	3	4	5	
				Rasio Posyandu per Satuan Balita	
				Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	
				Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	
II. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	Pertumbuhan PDRB	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Persentase Koperasi Aktif	
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total PDRB	
				Kontribusi sektor Perdagangan terhadap total PDRB	
		2. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
			Tingkat partisipasi angkatan kerja		
	2. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	1. Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah
					Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah
	3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	1. Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	

1	2	3	4	5	
III. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial	1. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	Angka kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	
			2. Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	
			3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	
	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	3. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	Angka kriminalitas	1. Meningkatkan layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	
				Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	
				2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase penurunan angka kriminalitas
					Persentase penindakan atas pelanggaran Perda

1	2	3	4	5
IV. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	Predikat Adipura Predikat Wahana Tata Nugraha	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	Luasan kawasan kumuh Persentase jalan kota dalam kondisi baik Persentase layanan air bersih
	2. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH	1. Meningkatkan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya
V. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK Nilai SAKIP Kota Malang Opini BPK
	2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2013-2018, digunakan 4 (empat) strategi pokok yaitu strategi *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro gender*. *Pro growth* berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Pro job*

berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. *Pro poor* berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada Wong Cilik, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. *Pro gender* berarti pembangunan di Kota Malang dilakukan dengan prinsip kesetaraan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan. Keempat strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2013-2018, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
		Angka Melek Huruf
		Angka kelulusan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	2. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
		Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Rasio Posyandu per Satuan Balita
		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
3. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	3. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Persentase koperasi aktif
		Kontribusi sektor UKM terhadap total PDRB
	4. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor Perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap total PDRB
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB
4. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	5. Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Tingkat partisipasi angkatan kerja
	6. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah
5. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	7. Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)
6. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	8. Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan
	10. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani
7. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
8. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	12. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti
		Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA
	13. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase penurunan angka kriminalitas Persentase penindakan atas pelanggaran Perda
9. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	14. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	Luasan kawasan kumuh
		Persentase jalan kota dalam kondisi baik
		Persentase layanan air bersih

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
10. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	15. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH
		Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani
		Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya
11. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	16. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK
		Nilai SAKIP Kota Malang
		Opini BPK
12. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	17. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,63
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	89,03
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	95,01
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	72
Angka Melek Huruf	%	99,95
Angka kelulusan		
– SD/MI	%	99,25
– SMP/MTs	%	99,68
Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	%	100

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	-	15
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	-	120
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	-	1,12
Rasio Posyandu per Satuan Balita	-	1:101
Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	%	78
Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,10

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase koperasi aktif	%	80,95
Kontribusi sektor UKM terhadap total PDRB	%	54,87

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Kontribusi sector Perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap total PDRB	%	40,04
Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	32,02

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	85

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	5,00

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)		
– Beras	Ton	11.040
– Jagung	Ton	509,41
– Kedelai	Ton	7486,27
– Daging	Ton	27002,19
– Telur	Ton	2490,40
– Susu	Ton	259,12
– Ikan	Ton	84,34
– Gula	Ton	256,91

Sasaran Strategis 8

Menurunnya persentase penduduk miskin

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Angka kemiskinan	%	4,30

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	%	21

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase korban bencana yang tertangani	%	100

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	76,49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	78,91

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	%	100

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	%	15

Sasaran Strategis 13

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase penurunan angka kriminalitas	%	10
Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	%	100

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Luasan kawasan kumuh	ha	389,60
Persentase jalan kota dalam kondisi baik	%	98
Persentase layanan air bersih	%	95
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	%	90

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Persentase luasan RTH	%	15,97
Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	%	95
Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	%	60

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	SKPD	6
Nilai SAKIP Kota Malang	-	68
Opini BPK	-	WTP

Sasaran Strategis 17

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	78,66



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tahap/fase terakhir dari periode pelaksanaan RPJMD Kota Malang 2014-2018 maka dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah direncanakan pada awal periode. Pengukuran tersebut merupakan manifestasi simbolis dari komitmen akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan

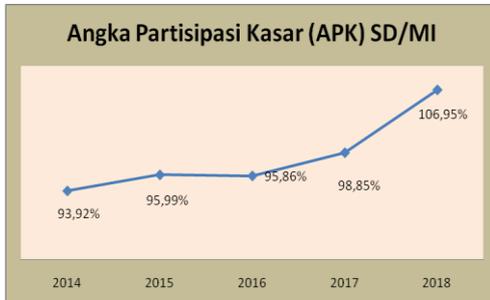
sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

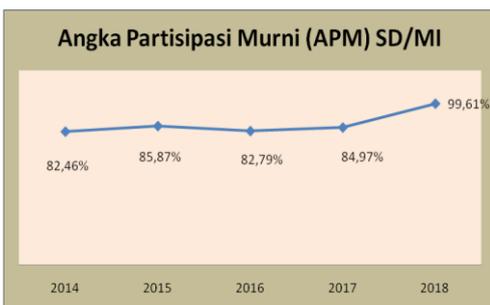
1. Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Untuk mewujudkan pembangunan dalam suatu daerah tentunya perlu didukung oleh segenap potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk

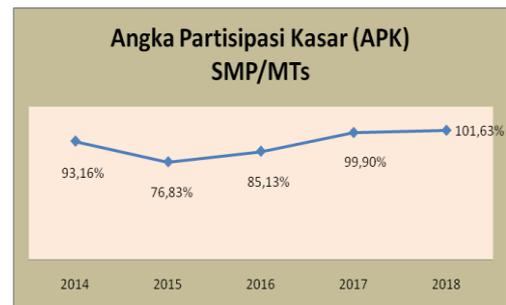
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut.



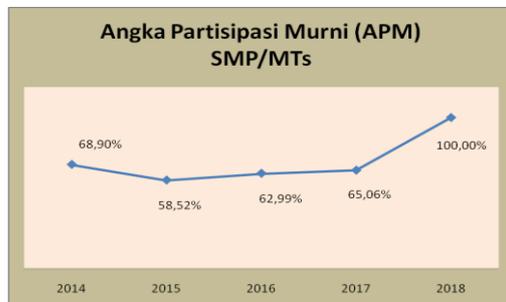
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2018 sebesar 106,95%, dalam arti terdapat 6,95% siswa SD/MI diluar usia 7-12 tahun.



Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2018 sebesar 99,61%, dalam arti terdapat 0,39% siswa SD/MI yang tidak masuk dalam usia 7-12 tahun.



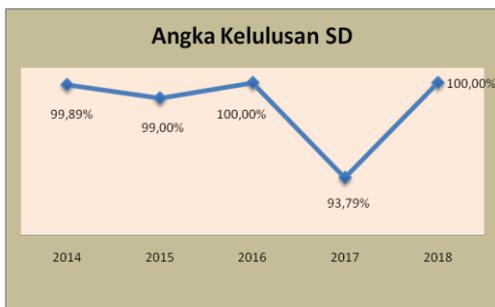
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 101,63%, dalam arti terdapat 1,63% siswa SMP/MTs diluar usia 7-12 tahun.



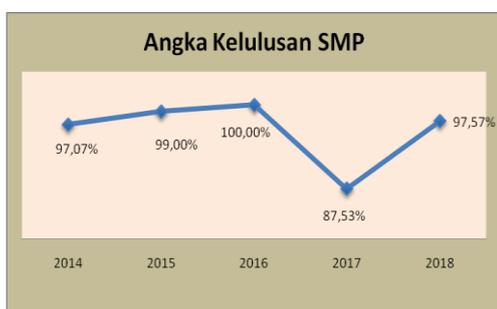
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts pada tahun 2018 sebesar 100%, dalam arti seluruh anak usia 13-15 tahun masuk sekolah SMP/Mts.



Capaian indikator angka Melek Huruf juga termasuk dalam kategori sangat berhasil atau 99,09%, yang menunjukkan bahwa tingkat buta aksara di Kota Malang sangat kecil.



Pada tahun 2018 siswa SD yang mengikuti ujian sebanyak 14.383 siswa atau telah lulus 100 persen.



Dari total siswa SMP yang terdaftar dalam daftar ujian sebanyak 14.692 telah mengikuti ujian dan lulus sebanyak 14.335 siswa.



Dari ilustrasi (gambaran capaian indikator kinerja utama) di samping, terlihat bahwa capaian kinerja (hasil pelaksanaan program dan kegiatan) di bidang

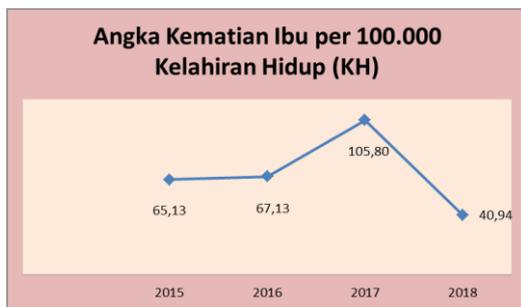
pendidikan sebagai urusan wajib termasuk dalam kategori sangat berhasil. Mengingat keterbatasan/kendala ekonomi bagi peserta didik tidak menjadi hambatan dalam pendidikan (proses belajar mengajar) hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs (tercapai 100%).

2. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

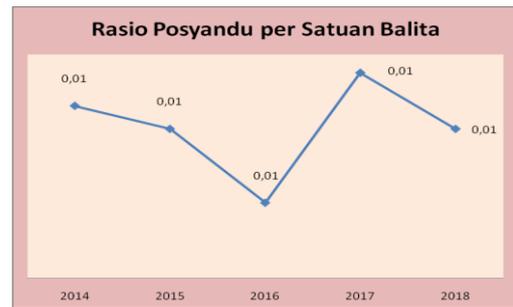
Sebagai urusan wajib pemerintah daerah, pelaksanaan program di bidang kesehatan merupakan salah satu tolok ukur/indikator keberhasilan pembangunan.



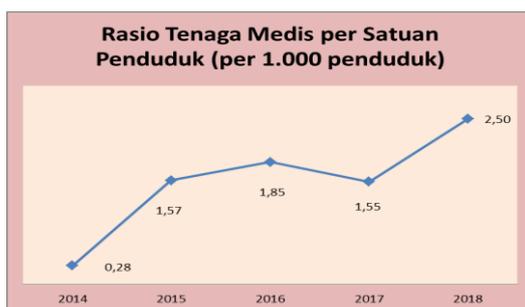
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 telah menurun menjadi 6,54 atau 7 kematian bayi.



Angka kematian Ibu juga berhasil diturunkan menjadi 40,94 atau 41 orang per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2014, kedua indikator sebagaimana tersebut tidak diukur karena belum menjadi indikator sasaran pada RPJMD Kota Malang 2014-2018.



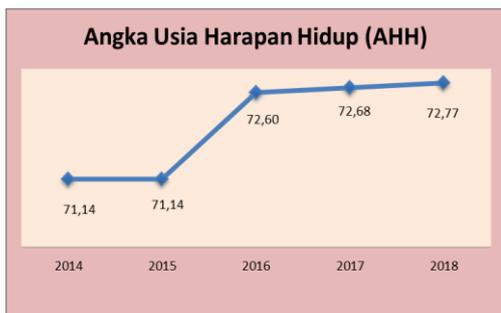
Pada tahun 2014 rasio posyandu per satuan balita adalah 1:97. Pada tahun 2015 rasio posyandu per satuan balita adalah 1:94. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 549 posyandu dan bertambah 3 posyandu atau sejumlah 552 pada tahun 2018.



Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan capaian yang disebabkan adanya pencatatan ganda terhadap tenaga medis. Sedangkan pada tahun 2018 tenaga medis bertambah sebanyak 894 orang dari 1397 orang menjadi 2291 orang.



Persentase penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis mengalami penurunan di akhir tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan penerbitan Surat Pernyataan Penduduk Miskin yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Kota Malang.



Angka usia harapan hidup (AHH) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup tercapai sebesar 72,77. Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah pola hidup tidak sehat khas warga perkotaan yang modern. Solusi atas permasalahan tersebut tentunya dengan upaya preventif, kuratif (pengobatan), dan promotif (ajakan untuk hidup sehat).

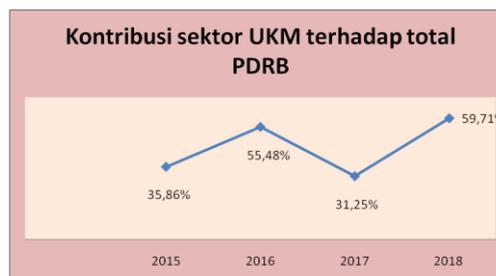
3. Sasaran Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

Program/kegiatan Pengembangan usaha mikro dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah bahkan di tingkat nasional. Termasuk dalam hal penyediaan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Keberadaan usaha mikro dan

koperasi di Kota Malang berperan besar dalam aktivitas ekonomi kerja.



Pada tahun 2018 persentase koperasi sehat tercapai sebesar 47,13 persen dari jumlah seluruh koperasi (sebanyak 345 koperasi aktif/sehat dari jumlah total 732).



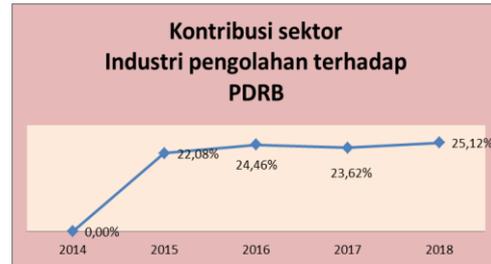
Pada tahun 2018 kontribusi sektor UKM tercapai sebesar 59,71% terhadap total PDRB. Sedangkan pada tahun 2014 terhadap indikator dimaksud belum dilakukan pengukuran dikarenakan belum menjadi indikator sasaran pada RPJMD.

4. Sasaran **Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata**

Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata dan pariwisata juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi, selain usaha mikro dan koperasi. Sedangkan pada sektor pariwisata di Kota Malang lebih diarahkan kepada wisata belanja mengingat Kota Malang tidak memiliki destinasi/objek wisata alam.



Pencapaian indikator sasaran ini relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada akhir periode RPJMD tercapai sebesar 34,59%. Sedangkan pada tahun 2014 terhadap indikator dimaksud belum dilakukan pengukuran dikarenakan belum menjadi indikator sasaran pada RPJMD.



Satu lagi sektor yang berkontribusi terhadap total PDRB adalah industri pengolahan. Pada akhir periode RPJMD tercapai sebesar 25,12%. Sedangkan pada tahun 2014 terhadap indikator dimaksud belum dilakukan pengukuran dikarenakan belum menjadi indikator sasaran pada RPJMD.

5. Sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja**

Sebagai salah satu unsur/pelaku kegiatan ekonomi, tenaga kerja telah diberdayakan lewat program/kegiatan Tahun 2018. Seperti bursa kerja, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya.



Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan menjadi 6,79% pada Tahun 2018.



Sedangkan capaian tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 96% sampai dengan Tahun 2018.

6. Sasaran Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah

Iklm investasi serta kondisi Kota Malang yang kondusif turut menjadi pertimbangan bagi para investor yang akan memulai menjalankan bisnis. Pada akhirnya hal tersebut juga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, PDRB, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.



Peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah tercapai 35,38% pada Tahun 2018 dengan nilai total investasi sebesar Rp. 11.149.637.116.267,30.

7. Sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*)

Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketersediaan pangan pada prinsipnya memang ditujukan dalam upaya membangun ketahanan pangan. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau.



Ketersediaan pangan tercapai 100,92% pada Tahun 2018 yang menunjukkan kemampuan pemenuhan pangan bagi warga Kota Malang.

8. Sasaran Menurunnya persentase penduduk miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



Sampai dengan tahun 2018, angka kemiskinan di Kota Malang berhasil diturunkan menjadi 4,10%.

9. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Penyandang cacat fisik dan mental (disabilitas) serta lanjut usia tidak potensial secara psikis mengalami rasa rendah diri dan kesulitan menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat. Pelayanan publik menjadi salah satu kunci bagi pemerintah dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial.



Pada akhir periode RPJMD Kota Malang, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan terealisasi sebesar 40,36%.

10. Sasaran **Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana**

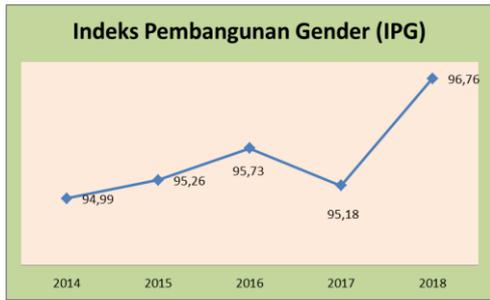
Setiap kali bencana terjadi, maka tuntutan publik terhadap peran serta pemerintah dalam menanggulangnya selalu mengemuka. Pemerintah diharapkan sebagai pihak yang paling mampu menangani bencana, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkannya (rehabilitasi).



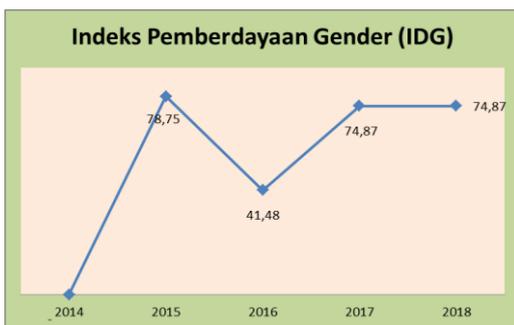
Dari ilustrasi sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal. Mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana. Pada tahun 2018 terdapat jumlah korban bencana sebanyak 77 orang, dan korban meninggal dunia 3 (tiga) orang.

11. Sasaran **Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender**

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.



IPG digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan wanita. Pada Tahun 2018 IPG Kota Malang tercapai sebesar 96,76.



IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Pada Tahun 2018 IDG Kota Malang tercapai sebesar 74,87.

12. Sasaran Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Pelayanan di bidang keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama. Pelayanan dimaksud juga mencakup pembinaan dalam kerangka peningkatan kerukunan antar umat beragama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya kondisi Kota Malang yang aman, damai, dan kondusif dapat diwujudkan.



Dari gambaran di atas nampak sekali komitmen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan toleran antar umat beragama di Kota Malang, dimana seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama telah ditindaklanjuti.

Pada tahun 2018 terdapat 38 kesepakatan yang telah ditindaklanjuti dari 40 kejadian,

2 (dua) kejadian masih dilakukan mediasi.

Sedangkan kerusuhan bermotif SARA (Suku, Agama, dan Ras) pada tahun 2018 terdapat 1 kejadian, yang telah dapat diselesaikan. Hal tersebut tentunya membuat kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota Malang menjadi sangat kondusif.

13. Sasaran Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

Kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai merupakan cita-cita seluruh umat manusia secara universal. Untuk itu diperlukan perangkat aturan (norma dan hukum) dan peran pemerintah dalam menciptakan dan memfasilitasi kondisi ketertiban dan keamanan di masyarakat.



Sampai dengan Tahun 2018, terdapat penurunan angka kriminalitas sebesar 10,45%.



Sedangkan penindakan atas pelanggaran Perda pada tahun 2018 tercapai sebesar 89,51%.

14. Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan (infrastruktur) beserta daya dukungnya memang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Di sisi lain pembangunan tersebut berwawasan lingkungan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem alam.



Luasan kawasan kumuh dari tahun 2014 seluas 608,60 Ha dan pada tahun 2018 menjadi 298,81 Ha. Program/kegiatan yang ada diarahkan dalam rangka pemeliharaan kawasan menjadi kampung tematik, bukan menurunkan luasannya. Penyebab lainnya adalah lokasi kawasan dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam hal ini Dinas Pengairan).



Terdapat penambahan data jalan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Malang sehingga menambah volume/panjang jalan yang harus dipelihara agar senantiasa dalam kondisi baik.



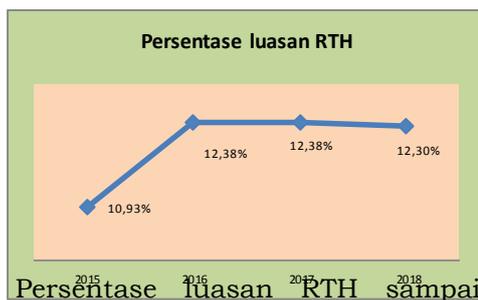
Secara umum layanan air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Turunnya persentase layanan air bersih pada tahun 2016 ke tahun 2017 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Kepala Keluarga (KK) akibat pecah KK maupun mutasi masuk.



Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air belum sesuai dengan harapan target 90 persen terpenuhi pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena daerah aliran sungai juga dipengaruhi oleh daerah hulu (asal aliran sungai) di luar Kota Malang. Pada tahun 2014-2016 belum menjadi indikator RPJMD.

15. Sasaran Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan sekaligus mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam. Disisi lain diperlukan perlindungan/pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.



Persentase luasan RTH sampai dengan tahun 2017 sebesar 12,38 persen dari total luasan 110,26 Km². Sedangkan tahun 2018 menjadi 12,30% dari total luasan 110,78 Km². Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak ada

penambahan luasan RTH, namun lebih pada memelihara/mempertahankan luasan RTH. Pada tahun 2014 tidak ditampilkan capaiannya karena terjadi perubahan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang.



Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani pada akhir tahun 2018 sebesar 100 persen.



Persentase luasan wilayah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pada tahun 2014 tidak dilakukan pengukuran, mengingat belum menjadi indikator sasaran RPJMD Kota Malang.

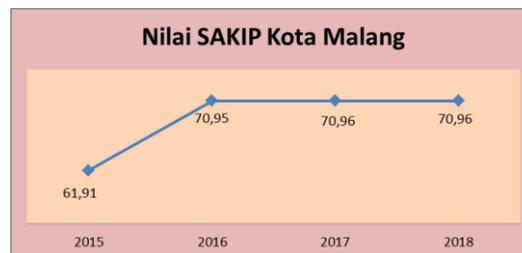
16. Sasaran **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilaksanakan atas semua kegiatan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Tujuannya adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, baik, terpercaya (*good and clean government*)



Belum adanya perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) karena masih belum memenuhi indikator sebagai WBK melalui penilaian dari Kementerian PAN dan RB terhadap perangkat daerah yang telah dicanangkan sebagai *pilot project* Zona Integritas. Sedangkan penilaian mandiri (*self assessment*) telah dilakukan dan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi secara komprehensif untuk mewujudkan

perangkat daerah yang ditetapkan sebagai WBK.



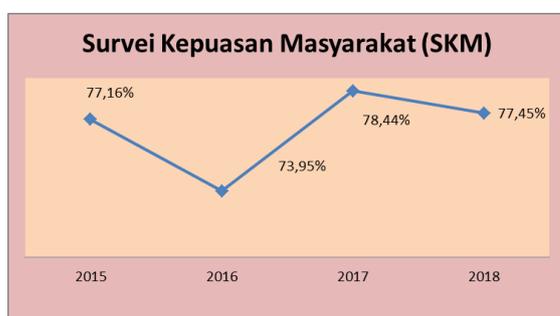
Kota Malang telah berhasil mencapai target nilai SAKIP kategori BB sampai dengan akhir Tahun 2018.



Sampai dengan akhir Tahun 2018 selama 7 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Malang berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI. Hal tersebut penting sekali mengingat WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

17. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tugas pemerintah pada hakekatnya adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian Pelayanan Prima dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dapat diukur melalui piranti survey kepuasan masyarakat.



masyarakat. Namun dengan adanya perubahan kebijakan, perbaikan layanan, inovasi pelayanan maka capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Kota Malang berhasil ditingkatkan.

B. INOVASI DAERAH

Paradigma dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik senantiasa berkembang. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis berupa inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang.

1. **Brexit**

Braille E-Ticketing Extraordinary Information (Brexit) merupakan inovasi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari Puskesmas Janti. Inovasi ini awalnya digagas Puskesmas pada tahun 2017 yang pada intinya berusaha memberikan pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas, khususnya pasien tuna netra. Fasilitas yang diberikan bagi penyandang tuna netra antara lain papan bertuliskan huruf Braille di puskesmas, jalan khusus *guiding block*, dan karpet jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra.

2. **SAMBAT Online**

Pemerintah Kota Malang telah memiliki Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya (SAMBAT) *Online* yang dirintis sejak April 2016. Banyak warga yang mengirim sambatan atau keluhan lewat *website* atau SMS. Keluhan warga ini akan direspon/ditanggapi oleh Organisasi Perangkat Daerah

(PD), mulai soal CPNS, tarif angkot, dan sebagainya. Aplikasi layanan aduan ini dihadirkan sebagai komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik sekaligus wujud nyata pemberian ruang bagi terbangunnya nilai-nilai partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Aplikasi SAMPADE

Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BPPD Kota Malang. SAMPADE dirancang guna memudahkan masyarakat untuk membayar pajak secara aktual dan efisien. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa mengetahui informasi objek pajak, tagihan, tunggakan, informasi sistem pembayaran, serta pengumuman pajak daerah.



Pada akhirnya upaya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. 7 kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);



2. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dengan nilai BB;
3. Penghargaan Otonomi Award dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tingkat Jawa Timur;
4. Penghargaan Kota Layak Anak 2018. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA);
5. Penghargaan [Pasar Tertib Ukur](#) (PTU) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag);



6. Penghargaan *Innovative Government Award* 2018 dari Kementerian Dalam Negeri.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.360.831.551.277,57 dengan realisasi sebesar Rp. 1.925.117.367.203,55 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 936.477.486.297,94 dengan realisasi sebesar Rp. 820.885.409.623,28 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.424.354.064.979,63 dengan realisasi sebesar Rp. 1.104.231.957.580,27 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 435.714.184.074,02.

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	265.786.701.856,00	244.533.843.468,54	92,00%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 107,41%, dengan kategori sangat **Berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8%. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan **efektif dan efisien**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	150.773.802.673,63	109.689.657.088,60	72,75%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 164,88%, dengan kategori **Sangat Berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 27,25%. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan **efektif dan efisien**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	7.589.307.000,00	6.766.244.467,00	89,15%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 83,52%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	42.926.339.300,00	35.655.688.801,55	83,06%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 82,42%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kesempatan kerja	4.517.195.100,00	3.802.462.461,00	84,18%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 104,80%, dengan kategori **sangat berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,82%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	3.392.360.000,00	2.577.921.135,00	75,99%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 700,70%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 24,01%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	6.824.684.950,00	6.824.684.950,00	86,61%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 3.189%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,39%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial	Menurunnya penduduk miskin	15.218.796.797,00	14.726.507.797,00	96,77%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 104,88%, dengan kategori Sangat **Berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,23%. **Sehingga** pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan **efektif dan efisien**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	4.016.098.500,00	3.745.708.596,00	93,27

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 192,18%, dengan kategori **Sangat Berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,73%. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan **efektif dan efisien**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	5.403.876.790,00	3.633.767.113,00	67,24%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 32,76%. Korban bencana pada tahun 2018 sebanyak 77 orang dapat ditangani semua.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.	10.646.987.000,00	8.601.597.623,00	80,79%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 99,43%, dengan kategori **sangat berhasil** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,21%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1.052.640.000,00	706.247.726,00	67,09%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 81%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	48.732.145.900,00	18.990.687.066,00	38,97%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 117%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 61,03%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	344.536.852.246,00	240.667.757.923,28	69,85%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 61,97%, dengan kategori **Cukup Berhasil**. Pada indikator sasaran ini capaian persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengendalian terhadap aliran sungai tidak saja dipengaruhi oleh aliran sungai di wilayah Kota Malang.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	23.689.497.700,00	23.004.968.150,00	97,11%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 116,49%, dengan kategori **Sangat Berhasil** dan terdapat efisiensi sebesar 2,82%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	15.586.334.730,00	12.133.808.079,40	77,85%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 84,31%, dengan kategori **Berhasil** dan terdapat efisiensi sebesar 22,15%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	473.660.444.437,00	369.039.754.012,90	77,91%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 98,46%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 22,09%.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pada Misi 5 Sasaran Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada indikator Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) masih belum dapat tercapai karena nilai survei kepuasan eksternal pada saat penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah pada tahun 2018 belum memenuhi indikator sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Untuk selanjutnya sebagai langkah perbaikan sekaligus guna mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota Malang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong segenap Perangkat Daerah untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;

2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara konsisten dan objektif;
4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai WBK.

Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.



BAB IV - PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga Kota Malang pada tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan nilai BB (Kategori Sangat Baik).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Malang.

Malang, 25 Maret 2019
WALIKOTA MALANG,

Drs. SUTIAJI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, Oktober 2018
WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	89,03%
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	95,01%
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	72,00%
		5. Angka Melek Huruf	99,95%
		6. Persentas Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	99,25% 99,68%
		7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	100%
2.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	15
		2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	120
		3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,12
		4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:101
		5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	78%
		6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,1
3.	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	80,95%
		2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,87%
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap total PDRB	40,04%
		2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	32,02%
5	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	85%
6.	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	5%
7.	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) Beras (ton) Jagung (ton) Kedelai (ton) Daging (ton) Telur (ton) Susu (ton) Ikan (ton) Gula (ton)	11.040,04 509,41 7.486,27 27.002,19 2.490,40 259,12 84,34 256,91
8.	Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,30%
9.	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	21%
10.	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%
11.	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	76,49
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,91
12.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	15%
13.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	10%
		2. Persentase penindakan atas Pelanggaran Perda	100%
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung	1. Luasan kawasan kumuh	389,60
		2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	98%
		3. Persentase layanan air bersih	95%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	kota dengan berwawasan lingkungan	4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	90%
15.	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	15,97%
		2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	95%
		3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	60%
16.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	6
		2. Nilai SAKIP Kota Malang	68
		3. Opini BPK	WTP
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,66

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 105.485.322.590,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 117.854.032.798,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 12.993.636.520,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Rp. 15.586.334.730,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 1.895.000.000,00
6	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 773.348.600,00
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.119.101.850,00
8	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 177.008.972.500,00
9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 73.990.278.906,00
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 524.700.000,00
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rp. 37.916.639.381,00
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 13.223.006.150,09
13	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp. 33.084.952.160,54
14	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp. 507.111.800,00
15	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rp. 136.392.000,00
16	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 3.470.860.000,00
17	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp. 1.279.365.500,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
18	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.584.766.600,00
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Rp. 12.434.170.000,00
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp. 589.500.000,00
21	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	Rp. 15.534.279.082,00
22	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 30.488.060.000,00
23	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 2.639.698.600,00
24	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 2.886.092.650,00
25	Program Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong	Rp. 1.275.809.800,00
26	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 116.954.007.951,00
27	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rp. 757.050.000,00
28	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp. 2.388.040.000,00
29	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp. 11.515.474.532,00
30	Program Pembangunan Sumber Daya Air	Rp. 300.000.000,00
31	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Rp. 226.330.000,00
32	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor	Rp. 65.076.308.300,00
33	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 20.862.947.730,00
34	Program Perencanaan Ruang	Rp. 211.240.000,00
35	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 183.430.000,00
36	Program Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase	Rp. 849.155.000,00
37	Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah	Rp. 50.000.000,00
38	Program Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan	Rp. 670.000.000,00
39	Program Bina Jasa Konstruksi	Rp. 581.800.000,00
40	Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Rp. 1.070.000.000,00
41	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp. 1.000.000.000,00
42	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Rp. 7.634.275.000,00

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
43	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Rp. 2.572.837.500,00
44	Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Rp. 18.281.981.500,00
45	Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Rp. 8.425.292.150,00
46	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 20.247.593.700,00
47	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp. 2.867.234.000,00
48	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp. 180.000.000,00
49	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.295.000.000,00
50	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Rp. 1.624.370.000,00
51	Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Rp. 883.959.000,00
52	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Rp. 3.837.225.000,00
53	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 30.098.781.000,00
54	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Rp. 13.895.091.200,00
55	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Rp. 391.000.000,00
56	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 3.625.098.500,00
57	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.323.705.597,00
58	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.210.127.500,00
59	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 831.730.600,00
60	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 1.515.337.000,00
61	Program Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.690.920.000,00
62	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 1.018.420.000,00
63	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 523.675.000,00
64	Program Pengembangan Panganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Rp. 890.000.000,00
65	Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	Rp. 567.088.000,00
66	Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Rp. 1.340.646.000,00
67	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 19.449.213.133,00
68	Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Rp. 525.235.000,00
69	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rp. 704.301.400,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN	
70	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	603.367.000,00
71	Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Rp.	969.708.700,00
72	Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Rp.	3.214.675.200,00
73	Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Rp.	9.264.494.000,00
74	Program Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan	Rp.	1.672.775.300,00
75	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	3.795.031.400,00
76	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.	1.857.671.100,00
77	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp.	878.716.000,00
78	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Rp.	734.290.000,00
79	Program Keluarga Berencana	Rp.	3.751.682.000,00
80	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	2.368.475.000,00
81	Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Rp.	1.083.200.000,00
82	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rp.	3.369.966.900,00
83	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	5.326.840.750,00
84	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	1.125.635.000,00
85	Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp.	1.607.125.900,00
86	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Rp.	1.045.048.000,00
87	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	2.415.313.500,00
88	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Rp.	1.765.515.000,00
89	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	15.564.763.524,00
90	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Rp.	421.910.000,00
91	Program Pengembangan Koperasi	Rp.	1.644.420.700,00
92	Program Pengawasan Koperasi	Rp.	682.450.000,00
93	Program Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	5.262.436.300,00
94	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	750.000.000,00
95	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Rp.	820.000.000,00
96	Program Pengolahan Data dan Informasi	Rp.	484.965.000,00
97	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Rp.	441.800.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
98	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp. 895.595.000,00
99	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp. 1.959.016.000,00
100	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp. 960.000.000,00
101	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp. 1.466.414.500,00
102	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp. 1.693.629.400,00
103	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 617.822.000,00
104	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Rp. 352.000.000,00
105	Program Pengelolaan Persandian	Rp. 405.600.000,00
106	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Rp. 4.410.125.500,00
107	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Rp. 400.004.555,00
108	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.369.738.500,00
109	Program Pengelolaan Arsip Daerah	Rp. 504.530.000,00
110	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rp. 1.637.049.500,00
111	Program Pengembangan Perbenihan Ikan	Rp. 1.034.088.450,00
112	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.748.500.000,00
113	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Rp. 1.780.000.000,00
114	Program Peningkatan Produksi Tanaman	Rp. 1.004.942.000,00
115	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 272.380.000,00
116	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 534.400.000,00
117	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian	Rp. 928.150.000,00
118	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 722.500.000,00
119	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 325.000.000,00
120	Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Rp. 23.094.119.800,00
121	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Rp. 1.944.165.000,00
122	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian	Rp. 610.000.000,00
123	Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar	Rp. 500.000.000,00
124	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Rp. 2.884.020.000,00
125	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Rp. 4.907.909.000,00
126	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.537.839.200,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN	
127	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rp.	2.372.551.000,00
128	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Rp.	1.690.327.200,00
129	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp.	4.249.169.500,00
130	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Rp.	2.265.949.000,00
131	Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	Rp.	2.647.593.300,00
132	Program Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	1.142.671.600,00
133	Program Panatausahaan Aset Daerah	Rp.	2.847.027.300,00
134	Program Pemanfaatan Aset Daerah	Rp.	941.962.800,00
135	Program Peningkatan Pelayanan UPT	Rp.	112.136.400,00
136	Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Rp.	3.262.574.536,00
137	Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Rp.	1.521.025.000,00
138	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Rp.	4.797.040.364,00
139	Program Optimaslisasi Pelayanan UPT	Rp.	721.622.500,00
140	Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Rp.	2.622.727.500,00
141	Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai	Rp.	143.250.000,00
142	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp.	7.985.877.550,00
143	Program Pembinaan Kepegawaian	Rp.	569.737.000,00
144	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Rp.	575.800.000,00
145	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Rp.	2.410.000.000,00
146	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Rp.	3.365.000.000,00
147	Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran, dan Hubungan Antar Lembaga	Rp.	10.675.000.000,00
148	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp.	22.997.300.000,00
149	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp.	1.335.070.000,00
150	Program Pengembangan Kebijakan Bidang SDA dan Infrastruktur	Rp.	685.000.000,00
151	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp.	1.985.800.000,00
152	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.658.550.000,00
153	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Rp.	3.233.850.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
154	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 2.171.000.000,00
155	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 700.000.000,00
156	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 3.719.200.000,00
157	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Rp. 735.995.500,00
158	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Rp. 948.470.800,00
159	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Rp. 687.306.400,00
160	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Rp. 2.013.379.000,00
161	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 10.070.100.000,00
162	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 22.692.597.600,00
163	Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 18.366.340.000,00
164	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.052.640.000,00
165	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.492.100.900,00
166	Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	Rp. 100.000.000,00
167	Program Kewaspadaan Daerah	Rp. 4.400.710.000,00
168	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp. 1.381.850.000,00
169	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp. 1.650.381.000,00
170	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Rp. 2.371.645.790,00
171	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Rp. 32.382.744.750,000
172	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.435.504.750,00
173	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Rp. 25.318.317.750,00



Oktober 2018

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI